



LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

- Rapat ke : 6 (enam)
Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Pertahanan (Menhan), dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham))
- Hari, Tanggal : Rabu, 30 November 2016
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : **Sesi I:**
Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014, yaitu:
1. Pembukaan;
 2. Penjelasan Pemerintah;
 3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi;
 4. Pembahasan Materi RUU dan Penjelasan
- Sesi II:**
Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan, yaitu:
1. Pendapat Akhir Mini Fraksi;
 2. Pendapat Akhir Pemerintah;
 3. Pengambilan Keputusan Terhadap RUU
 4. Penandatanganan Naskah RUU;
 5. Penutup.
- Hadir : 1. ... orang dari 53 Anggota Komisi I DPR RI
2. a. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi;

- b. Menteri Luar Negeri, diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Ferry Adamhar;
- c. Menteri Pertahanan, diwakili oleh Dirjen Strahan Kemhan, Mayjen TNI DR. Yoedhi Swastanto;
- d. Menteri Hukum dan HAM, diwakili oleh Direktur Harmonisasi PUU Kemkumham, Dahan;
beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 14.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhub, Menlu, Menhan, dan Menkumham) pada hari Rabu, tanggal 30 November 2016 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.

II. KESIMPULAN

1. Setelah mendengarkan Penjelasan Pemerintah dan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore, 2014*).
2. Komisi I DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore, 2014*), dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.
3. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore, 2014*), Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui RUU tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore, 2014*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.15 WIB.

Jakarta, 30 November 2016
KETUA RAPAT,

TTD

Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.
A-165